

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Diploma III membuat peraturan akademis terhadap studi kuliahnya yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang sebagai persyaratan untuk kelulusannya. Dimana kegiatan magang tersebut dilaksanakan dalam 40 hari kerja, yang mana kegiatan magang ini dilaksanakan di suatu Instansi Pemerintahan. Magang merupakan mata kuliah wajib, yang merupakan syarat untuk mengakhiri studi Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kegiatan magang merupakan program yang dapat melahirkan mahasiswa – mahasiswa yang terampil, handal dan memiliki pengetahuan yang berkualitas agar dapat dipraktekkan dalam dunia kerja yang ketat akan persaingan. Dengan adanya kegiatan magang, diharapkan setelah mengikuti kegiatan magang tersebut penulis dapat mengambil ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja yang tidak penulis dapatkan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, penegasan tersebut menyatakan bahwa penguasaan pengelolaan keuangan negara adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden dan sebagian diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan pusat.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah ialah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pemerintah telah melakukan perubahan atau reformasi dibidang keuangan pada tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Cara Penyampiannya. Dengan berlakunya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan negara/daerah dapat lebih efektif dan efisien serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Oleh karena itu dokumen anggaran di suatu SKPD telah disatukan kedalam sebuah dokumen yang dinamakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang pelaksanaannya menyangkut akuntabilitas yang tinggi dari Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran.

Pada dasarnya, penatausahaan keuangan di SKPD dipegang oleh seorang bendahara penerimaan dan seorang bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.

Dalam penyelenggara keuangan pada bendahara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis mencoba mempelajari tentang penatausahaan pada bendahara pengeluaran dengan melakukan kegiatan magang sebagai penerapan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Magang dengan judul **“Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang ingin penulis angkat dalam laporan magang ini adalah :

Bagaimanakah mekanisme penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan magang ini terbagi dua yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Dengan adanya kegiatan magang akan menambah keterampilan yang tidak mahasiswa dapatkan selama di bangku perkuliahan.
3. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga dapat memiliki wawasan dan pengalaman.
4. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan kerja di masa akan datang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui mekanisme penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, antara lain:

1. Bagi Instansi
 - a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi yaitu dengan adanya mahasiswa magang dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja dan menerapkan ilmu – ilmu yang telah diperoleh penulis di bangku perkuliahan.
- c. Menambah ilmu dan kemampuan untuk memahami dunia kerja yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan magang di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja. Penulis melaksanakan kegiatan magang di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dari bulan Januari sampai Februari 2015.

1.6 Sistematika Laporan Magang

Sistematika laporan magang ini nantinya akan dikelompokan atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Tempat dan Waktu magang, Sistematika Laporan Magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang Landasan Teori yang terdiri dari :

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengertian Penatausahaan Pengeluaran, Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran, Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran, Dokumen Penatausahaan Pengeluaran.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan tentang : Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Struktur Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV MEKANISME PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini berisikan tentang hasil yang telah penulis dapatkan saat mengikuti kegiatan magang yang berkenaan tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Ganti Uang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Pembayaran Langsung Gaji & Tunjangan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, dan Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran

Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan, kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan saran yang dapat diberikan sehingga memberikan pemasukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

